EMEN

# EVALUASI TERHADAP PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH MENUJU TERCIPTANYA *GOOD GOVERNANCE* PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Skripsi Oleh :

PERTIWI FATRINA
01053130059

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
TAHUN 2009

07

657.835 07
Fat
c
C-091272
2009

# EVALUASI TERHADAP PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH MENUJU TERCIPTANYA *GOOD GOVERNANCE* PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

**Skripsi Oleh :**

**PERTIWI FATRINA**
**01053130059**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat**
**Guna Mencapai Gelar**
**Sarjana Ekonomi**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
**FAKULTAS EKONOMI**
**INDERALAYA**
**TAHUN 2009**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
**FAKULTAS EKONOMI**
**INDERALAYA**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

| | | |
|---|---|---|
| NAMA | : | PERTIWI FATRINA |
| NIM | : | 01053130059 |
| JURUSAN | : | AKUNTANSI |
| MATA KULIAH | : | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK |
| JUDUL SKRIPSI | : | EVALUASI TERHADAP PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH MENUJU TERCIPTANYA *GOOD GONERNANCE* PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN |

**PEMBIMBING SKRIPSI**

| TANGGAL PERSETUJUAN | | DOSEN PEMBIMBING |
|---|---|---|
| Tanggal 7 Juli 2009 | Ketua : | Ahmad Subeki, SE, M.M, Ak.<br>NIP. 132133708 |
| Tanggal 2 Juli 2009 | Anggota : | Eka Meirawati,SE, M.Si, Ak<br>NIP. 132149309 |

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**INDERALAYA**

## TANDA PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

| | | |
|---|---|---|
| NAMA | : | PERTIWI FATRINA |
| NIM | : | 01053130059 |
| JURUSAN | : | AKUNTANSI |
| MATA KULIAH | : | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK |
| JUDUL SKRIPSI | : | EVALUASI TERHADAP PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH MENUJU TERCIPTANYA *GOOD GONERNANCE* PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN |

Telah dilaksanakan ujian komprehensif pada tanggal 30 Juli 2009 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Inderalaya, 30 Juli 2009

| Ketua, | Anggota, | Anggota, |
|---|---|---|
| Ahmad Subeki, SE, M.M, Ak. | Eka Meirawati,SE, M.Si, Ak | Arista Hakiki,SE,M.Acc,Ak |
| NIP. 132133708 | NIP. 132149309 | NIP.132176860 |

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak
NIP. 131801649

## MOTTO

*"Take the best and Make it better"*

*Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk :*

*Kedua orang tuaku tercinta*

*Adik-adikku*

*Teman-teman*

*Dan Almamaterku*

# KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"EVALUASI TERHADAP PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH MENUJU TERCIPTANYA GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN"** yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun pembahasannya. Hal ini disebabkan karena penulis adalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan. Atas segala kekurangan tersebut penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dan penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Waalaikumsalam, wr. wb.

Penulis,

Pertiwi Fatrina

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "EVALUASI TERHADAP PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH MENUJU TERCIPTANYA GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN".

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan moril maupun materiil dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Prof.Dr.Badia Perizade,M.B.A selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Syamsurizal,Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ahmad Subeki,SE,MM,Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi I.
5. Eka Meirawati,SE,MSi,Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi II.
6. Arista Hakiki, SE,M.Acc,Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Semua Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Pimpinan dan Staf Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Kedua orang tuaku yang telah memberikan dukungan moril dan pendanaan, saudara-saudaraku : Cakra, Nong, Aulia atas gangguannya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Staf Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
11. Teman-teman sejati.... Ria, Savira, Monika, Renata, Vika, Dona, Dian yang dari jauh memberikan "juice" segar agar tetap sehat.

12. Sejawat seangkatan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya khususnya penggemar "**cokelat**", Yasmin, Villen, Pipit, Deka, Wahyu yang menjadi kekuatan menapaki tanah Indralaya.
13. Hari Nogroho yang selalu marah kalau telat kumpul perbaikan skripsi tapi suka nungguin malem-malem.
14. Indah Rizky Ariani, Gilang, Tanhar, Benny Wijaya yang bikin seru hidup.
15. Semua yang berperan dalam hidupku...

Semoga Allah SWT membalas budi baik dan memberikan berkah pada kita semua. Amin.

Penulis,

Pertiwi Fatrina

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... ii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SKRIPSI..... iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv
KATA PENGANTAR..... v
UCAPAN TERIMA KASIH..... vi
DAFTAR ISI..... viii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Perumusan Masalah..... 4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 5
1.3.1 Tujuan Penelitian..... 5
1.3.2 Manfaat Penelitian..... 6
1.4 Metodologi Penelitian..... 6
1.4.1 Ruang Lingkup Penelitian..... 6
1.4.2 Populasi dan Sampel..... 6
1.4.3 Metode Pengumpulan Data..... 7
1.4.4 Teknik Analisis Data..... 7
1.5 Sistematika Laporan..... 8

BAB II LANDASAN TEORI
3.1 Keuangan Daerah..... 11
2.1.1 Pengertian Keuangan Daerah..... 11
2.1.2 Ruang Lingkup Keuangan Daerah..... 12
2.1.3 Akuntansi Keuangan Daerah..... 13
2.1.4 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah..... 14
2.2 Akuntansi Keuangan Daerah Sebagai Bagian Dari Akuntansi Sektor Publik..... 15
2.2.1 Pengertian dan Lingkup Akuntansi Sektor Publik..... 16

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR: 091272
TANGGAL 31 OCT 2009

2.2.2 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik..... 18
2.2.3 Tujuan Akuntansi Sektor Publik..... 19
2.2.4 Kaitan Antara Akuntansi Keuangan Daerah Dan Akuntansi Sektor Publik..... 20
2.3 Pengertian Good Governance..... 21
2.4 Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance..... 26

BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
3.1 Gambaran Umum Kabupaten Musi Banyuasin..... 29
3.1.1 Sejarah Umum Kabupaten Musi Banyuasin..... 29
3.1.2 Letak dan Keadaan Alam..... 29
3.1.3 Luas Wilayah..... 30
3.2 Visi, Misi, dan Rencana Strategis..... 32
3.2.1 Visi..... 32
3.2.2 Misi..... 32
3.2.3 Rencana Strategis..... 34
3.3 Struktur Organisasi..... 35
3.4 Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin..... 41
3.4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin..... 41
3.4.2 Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin..... 47

BAB IV PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian Tingkat Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah..... 57
4.2. Analisis faktor-faktor kesiapan sumber daya manusia dalam penerapan akuntansi keuangan daerah..... 69
4.3. Keterbatasan Penelitian..... 79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan..... 80

5.2. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA..... 82

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dengan bergulirnya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya, khususnya PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka telah terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah. Daerah diberikan Hak otonomi untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat dan diberikan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Akan tetapi, dengan kewenangan yang luas tersebut, tidaklah berarti bahwa Pemerintah Kabupaten dapat menggunakan kekayaan daerah tersebut sesuka hati, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Pada hakekatnya hak dan kewenangan tersebut merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat di daerah maupun kepada Pemerintah Pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia.

Pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi ditandai dengan perubahan mendasar pada sistem penganggaran, perbendaharaan, sampai kepada pertanggungjawaban laporan keuangannya. Sebelum bergulirnya otonomi daerah, pertanggungjawaban laporan keuangan daerah yang harus disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten hanya berupa Laporan Perhitungan Anggaran dan Nota Perhitungan,

sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan tersebut adalah MAKUDA (Manual Administrasi Keuangan Daerah) yang diberlakukan sejak tahun 1981. Seiring berlakunya otonomi daerah, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang harus dibuat oleh Kepala Daerah meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan daerah ini diberlakukan sejak 15 Mei 2006.

Sistem MAKUDA yang memiliki ciri-ciri, antara lain single entry (pembukuan tunggal), incremental budgeting (penganggaran secara tradisional yakni rutin dan pembangunan) dan pendekatan anggaran berimbang dinamis sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan daerah karena beberapa alasan :

1. Tidak mampu memberikan informasi mengenai kekayaan yang dimiliki oleh daerah, atau dengan kata lain tidak dapat memberikan laporan neraca.
2. Tidak mampu memberikan informasi mengenai laporan aliran kas sehingga manajemen atau publik tidak dapat mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan adanya kenaikan atau penurunan kas daerah.
3. Sistem yang lama (MAKUDA) ini juga tidak dapat membantu daerah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berbasis kinerja sesuai ketentuan PP 105/2000, yaitu :
   - Pasal 5 yang mewajibkan daerah membuat laporan pertanggungjawaban berbasis kinerja.
   - Pasal 8 yang menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output). PP Nomor 108/2000

Pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah khususnya pada sistem akuntansi keuangan daerah di respon positif oleh pemerintah pusat dan Ikatan

Akuntan Indonesia ( IAI) . Hal ini dapat dilihat dengan diterbitkannya SK Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.07/2002 tanggal 5 juni 2001 yang membentuk Tim Pokja dengan keanggotaannya terdiri dari Depkeu, Depdagri, dan BPKP. Tim Pokja ini telah menghasilkan suatu draft standar dan pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang telah di launching pada bulan agustus 2001.

Pada tahun berikutnya, yaitu pada bulan juni 2002, Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan SK Kepmendagri No.29 tahun 2002 tanggal 10 juni 2002 tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.* Pedoman SK Mendagri No.29/2002 dan buku Pedoman SAKD hasil Tim Pokja SK Menkeu 355 tanggal 5 juni 2001 adalah untuk merespon kevakuman standar yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Adapun yang terbaru adalah Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Dr. Bambang Subianto selaku anggota Komite Pengarah Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah mengatakan bahwa tujuan laporan keuangan pemerintah adalah dalam rangka akuntabilitas kepada publik, bukan untuk tujuan pengambilan keputusan seperti halnya di dunia komersial. Karena itulah sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) yang digunakan harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara, serta harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah agar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi perkembangan daerah tersebut.

Sebelum pemekaran wilayah pada 10 April 2002, Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) merupakan Kabupaten terluas se-Sumatera Selatan. Kecamatan Sekayu yang merupakan Ibukota Kabupaten Musi Banyuasin menjadi lokasi Kantor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, tepatnya di Jln. Kolonel Wahid Udin Lingkungan 1 No.240 Kelurahan Serasan Jaya Sekayu, kode pos 30711.

Sejak 2 januari 2008, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mulai menerapkan kebijakan akuntansi pemerintahan yang baru, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2006. Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah tidak serta merta dapat dilaksanakan, salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah kesiapan sumber daya manusia yang ada pada instansi pemerintah itu sendiri. Pemerintah Musi Banyuasin selaku pengelola aset dan kekayaan daerah dituntut untuk memiliki kemampuan dan kesiapan dalam mengelola sumber-sumber kekayaan daerah sesuai dengan aturan dan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Dari uraian tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :

**"EVALUASI TERHADAP PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH MENUJU TERCIPTANYA GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN"**

## 1.2. Perumusan Masalah

Dengan adanya pembaharuan dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang menuntut laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, maka pemerintah daerah harus meninggalkan sistem lama yang selama ini digunakan, yaitu sistem Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) karena sudah tidak dapat lagi mendukung kebutuhan akan pelaporan keuangan sesuai

dengan PP No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Apabila Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban tersebut tentunya akan membawa konsekuensi penolakan oleh DPRD, yang akan menimbulkan dampak politis terhadap kinerja kepala daerah karena dianggap telah melanggar ketentuan hukum yang ada.

Berdasarkan Uraian di atas, permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan Akuntansi Keuangan Daerah menuju terciptanya Good Governance di Era Otonomi pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin?

## 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Akuntansi Keuangan Daerah diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
2. Mempelajari dan memperdalam wawasan mengenai Akuntansi Sektor Publik khususnya arah dan perkembangan Akuntansi Keuangan Daerah pada instansi pemerintah.
3. Memberikan sumbangan pemikiran kepada sektor pemerintahan dan institusi dalam mengelola keuangan negara sehingga tercipta good governance di era otonomi daerah.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan mengenai penerapan akuntansi keuangan daerah di era otonomi.
2. Bagi Pemerintah Daerah, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada sektor pemerintahan guna menyiasati perkembangan Akuntansi Sektor Publik dimasa yang akan datang.
3. Pihak Lain, sebagai referensi dan informasi bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

**1.4. Metodologi Penelitian**

1.4.1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu mengenai penerapan akuntansi keuangan daerah dalam rangka mewujudkan good governance di era otonomi daerah.

1.4.2. Populasi dan Sampel

Sasaran populasi adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Sampel yang akan diambil yaitu pada staf/karyawan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

1.4.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari :

1.4.3.1. Studi Kepustakaan *(Library Research)*

Dengan menelusuri dan menelaah berbagai bahan referensi yang berkaitan dengan obyek penelitian, seperti Peraturan Pemerintah, SK Kepmendagri, praktek-praktek Akuntansi Keuangan Daerah yang berlaku di Indonesia, buku-buku, jurnal, dan artikel yang tergolong kedalam data sekunder.

1.4.3.2. Studi Lapangan *(Field Research)*

Dalam metode penelitian lapangan ini, penulis melakukan survei atau penelitian langsung pada obyek penelitian dengan maksud memperoleh data primer. Teknik yang digunakan adalah wawancara (tanya jawab) dan membagikan kuesioner kepada pegawai Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Daerah Musi Banyuasin yang berwenang dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah.

1.4.4. Teknik Analisis Data

1.4.4.1. Metode Kuantitatif

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang akan menghasilkan data primer. Data yang diperoleh dari kuesioner akan ditransformasi dalam bentuk angka yang kemudian akan diolah sehingga diperoleh persentase tingkat kesiapan sumber daya manusia yang menjadi salah satu objek penelitian. Untuk menghitung tingkat kesiapan SDM Dinas Pendapatan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin digunakan rumus :

$$\text{Tingkat kesiapan SDM} = \frac{\sum \text{Nilai Responden}}{\sum \text{Nilai Maksimum Kuesioner}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk menghitung rata-rata tingkat kesiapan sumber daya manusia Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Musi Banyuasin dalam penerapan akuntansi keuangan daerah digunakan rumus :

$$\text{Rata-rata Tingkat Kesiapan SDM} = \frac{\sum \text{Tingkat Kesiapan SDM (\%)}}{\text{Jumlah Responden}}$$

1.4.4.2. Metode Kualitatif

Dari data yang diperoleh, akan dibandingkan antara Permendagri No.13 Tahun 2006 dengan penerapan yang terjadi di lapangan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif bertujuan agar memperoleh hasil yang optimal.

## 1.5. Sistematika Laporan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas dan pemecahannya, maka penulis membagi penulisan penelitian ini menjadi lima bab, sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan untuk membahas dan mengevaluasi masalah dalam penelitian ini, diawali dengan konsep Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik, dan faktor yang mempengaruhi perkembangan dan penerapan dalam hal ini Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan akuntansi sektor publik pada instansi pemerintah, serta akuntansi yang diterapkan pada sektor publik dan konsep *good governance*.

**BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Bab ini memuat kondisi umum Kabupaten Musi Banyuasin sebagai obyek yang diteliti, meliputi geografis, visi, misi, struktur organisasi, dan rencana strategis pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

**BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil dan analisis permasalahan. Dari permasalahan akan dijabarkan kondisi realitas yang kemudian akan diperbandingkan dengan pedoman yang berlaku.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dari penelitian ini. Selain itu, penulis juga memberikan saran-saran sebagai masukan bagi perusahaan.

## 1.6. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Musi Banyuasin yang beralamat di Jln. Kolonel Wahid Udin lingkungan 1 No.240 Kelurahan Serasan Jaya Sekayu, kode pos 30711. Penelitian ini dilakukan sesegera mungkin setelah memperoleh persetujuan proposal skripsi.

# DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra, 2006. "Akuntansi Sektor Publik". Erlangga. Jakarta.

Halim, Abdul, 2007. "Akuntansi Keuangan Daerah". Salemba Empat. Jakarta.

Kuntadi, Cris, 2003. "Akuntansi Sektor Publik dan Karakteristik Khusus Akuntansi Pemerintahan". Makalah Akuntansi Keuangan Daerah. Pelatihan dan Pengenalan Akuntansi Keuangan Daerah.

Mardiasmo, 2002. "Akuntansi Sektor Publik". Edisi Pertama. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Nordiawan, Deddi, Uswahyudi Sondi Putra, Dkk, 2008. "Akuntansi Pemerintahan".Cetakan Kedua. Salemba Empat. Jakarta.

Soelendro, Arie, 2000. "Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik Melalui Pengawas Keuangan Negara yang Efektif".Prosiding Konvensi Nasional Akuntansi IV IAI Jakarta.